

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**TAHUN 2023-2026**

**KECAMATAN PAGENTAN**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KECAMATAN PAGENTAN**

Jln. Raya Pagentan No. 82 pagentan kode pos 53455

Pagentan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Pagentan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Kecamatan Pagentan. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Kecamatan Pagentan (Renstra Kecamatan Pagentan) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Pagentan jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Pagentan, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

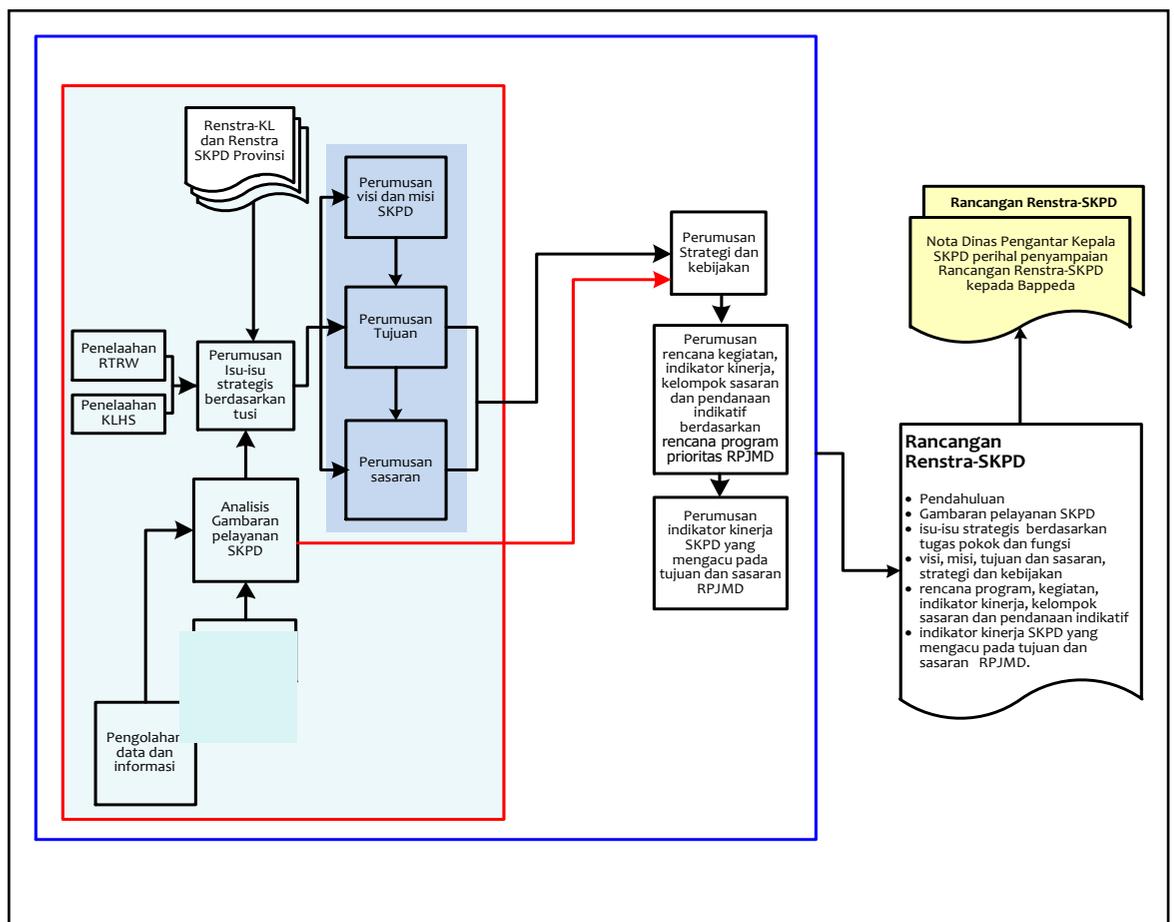
Renstra yang disusun berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan/ tahun 2023 – 2026. Dengan disusunnya renstra ini maka diharapkan arah atau kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dari pemerintah daerah dan dapat berjalan dengan selaras. Dengan fungsi seperti ini maka kegiatan kecamatan pagentan yang akan dilaksanakan terangkum semua dalam renstra tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pagentan Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah,

penyusunan Renstra Kecamatan Pagentan juga mengacu pada Renstra (*Kementerian/Lembaga terkait*), serta Renstra Kecamatan Pagentan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Kecamatan Pagentan adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

**Gambar 1.2**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Pagentan Kabupaten/Kota**



### 1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Pagentan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Pagentan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
26. Peraturan Bupati nomor 84 tahun 2016 tentang susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
28. Peraturan Bupati banjarnegara nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Pagentan agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Pagentan dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.

- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kecamatan Pagentan pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kecamatan Pagentan Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Pagentan
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

#### 1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAGENTAN**

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pagentan, Sumber Daya Kecamatan Pagentan, dan Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagentan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pagentan

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PAGENTAN**

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pagentan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pagentan dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Pagentan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pagentan dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Kecamatan Pagentan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

### **BAB VIII PENUTUP**

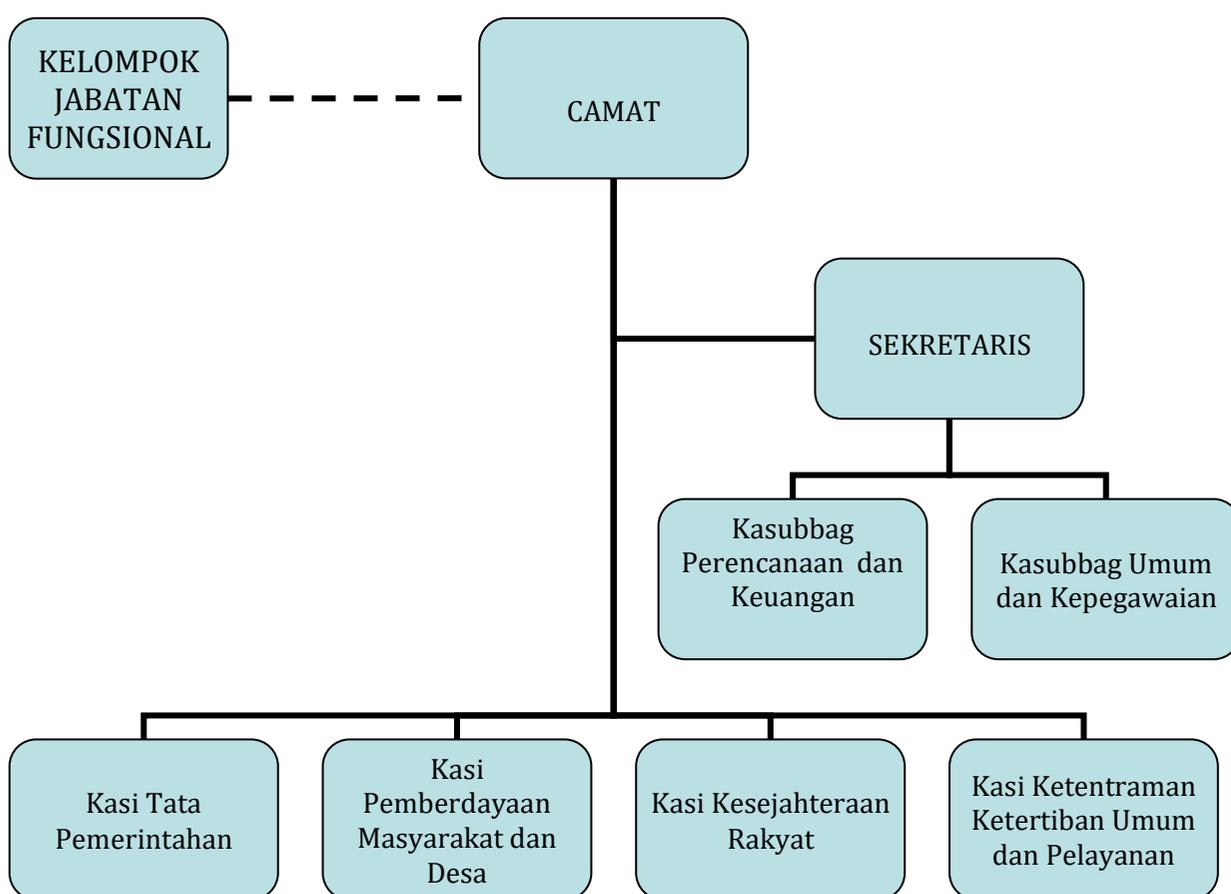


**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN KECAMATAN**  
**PAGENTAN**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pagentan**

**2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pagentan**

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PAGENTAN



**2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pagentan menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
- 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 5) Masih Lemahnya jaringan internet
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
- 2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- 4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
- 5) Kurangnya tertib administrasi desa
- 6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
- 7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
- 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
- 3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
- 4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
  - 1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
  - 2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
  - 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
  - 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
  - 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 3) Meningkatnya angka perceraian
  - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

## **2.2 Sumber Daya Kecamatan Pagentan**

### **2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagentan memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Pagentan saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukkan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 20 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 16 Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2.1

SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	10	3	
2	Perempuan	2	1	
JUMLAH TOTAL		12	4	

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2

SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	1				
2	STRATA 1	7		1		
3	SARJANA MUDA / D3	1	1		1	
4	SLTA	3		2		
5	SLTP					
6	SD					
JUMLAH TOTAL		12	1	3	1	

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3

SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b	1		
2	PEMBINA /IV a	1		
3	PENATA TK. I / III d	3		
4	PENATA / III c	1		
5	PENATA MUDA TK. I / III b	1		
6	PENATA MUDA / III a			
7	PENGATUR TK. I / II d		1	
8	PENGATUR / II c	1		
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	3		
10	PENGATUR MUDA / II a			
11	JURU TK. I / I d			
12	JURU / I c			
13	JURU MUDA TK. I / I b			
14	JURU MUDA / I a			
JUMLAH TOTAL		12	1	

#### 4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4

##### SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1		
2	ESELON III b	1		
3	ESELON IV a	4		
4	ESELON IV b	2		
JUMLAH TOTAL		8		

#### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pagentan memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1

##### Sarana Prasarana Asset Kecamatan Pagentan

No	Nama Asset	Jumlah	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1	Rusak	1
2	Pendopo Kec.	1	Baik	1
3	Rumdin Camat	1	Baik	1
4	aula	1	baik	1
4	Meja kerja pejabat	2	2 baik	8
5	Meja kerja staf	17	17 baik,	18
6	Kursi kerja pejabat	8	6 Rusak	8
7	Kursi kerja staf	17	17 Baik	18
8	Kursi rapat	90	90 baik	100
9	Meja kursi tamu	2	1baik,1 rusak	5
10	Komputer/PC	4	2 baik, 2 rusak	6
11	Laptop/Notebook	4	2 baik, 2 rusak	8
12	Printer	5	2 rusak	7
13	Mesin pemotong rumput	1	1 baik	3
14	Filling cabinet	8	8 rusak	9
15	Lemari kaca	1	1 baik,	4
16	Podium	1	1 baik	1
17	AC	1	1 rusak	4
18	Tenda	1	1 rusak	1
19	Genset	1	1 rusak	1
20	Sound system	2	2 baik	2
21	Televisi	2	1 baik	2
22	Antena SHF	2	2 rusak	2
23	Kendaraan roda empat	1	1 baik	1
24	Kendaraan roda dua	6	1 rusak	8
25	Lemari besi	-	-	
26	Papan tulis	2	1 rusak	3
27	Kursi besi panjang	1	1 baik	4
28	Meja rapat	8	8 rusak	10

29	Meja reseption	1	1 baik	2
30	Bangku tunggu			
31	UPS	1	1 baik	2
32	Proyektor & Attachment	1	1 baik	2
33	Facsimile			
34	Lemari Pakaian	-	-	2
35	Tempat tidur	2	2 baik	3
36	Meja Makan	1	1 baik	1
37	Kulkas	1	1 baik	2
38	Kompor Gas & Tabung	2	2 baik	2
39	Alat Pemadam Kebakaran	-	-	2
40	Camera	1	1 baik	1

### **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagentan.**

Gambaran kinerja *Kecamatan Pagentan* 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2022) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel

**Tabel T-C.23.**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara**  
**Tahun 2017-2022**

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indikat or lainnya	Target Renstra Tahun D					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun					
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		-	8 dokume n	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	100	100	100	100	100	
2	Jumlah dokumenpelaporan yang disusun		-	14 dokume nt	14 doku ment	14 doku ment	14 doku ment	14 doku ment	14 doku ment	14 doku ment	14 dok ume nt	1 Pak et	1 Pak et	1 Pak et	1 Pak et	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN		-	17	17	16	16	15	14	17	16	16	15	14	100	100	100	100	100	
4	Jumlah jasa adm. keuangan yang terbayarkan		-	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	100	100	100	100	100	
5	Jumlah dokumen keuangan yang disusun		-	-	-	8 doku m	8 doku m	8 doku m	8 doku m	-	8 dok um	8 dok um	8 dok um	8 dok um	-	100	100	100	100	
6	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terpenuhi		-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 Pak et	1 pak et	1 pak et	1 pak et	1 pak et	100	100	100	100	100	
7	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi		-	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 pak et	8 pak et	8 pak et	8 pak et	8 pak et	100	100	100	100	100	
8	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	-	2 paket	2 paket	1 Paket	1 Paket	1 Pak et	1 Pak et	1 Pak et	1 Pak et	1 Pak et	100	100	100	100	100	
9	Terpenuhinya Jasa		-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
10	Jumlah jasa listrik yang tersedia Air dan Listrik	paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	100	100	100	100
	Jumlah jasa pelayanan umum yang terbayarkan	orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100	100	100	100	100
	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	100	100	100	100
	Jumlah gedung dan rumah dinas yang terpelihara	unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100	100	100	100	100
	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani	Dokumen	200	300	250	200	300	300	300	300	300	300	300	300	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan KTP yang terlayani	laporan	12 laporan	100	100	100	100	100											
	Jumlah Pelayanan KK yang terlayani	laporan	12 laporan	100	100	100	100	100											
	Jumlah Penanganan Pengaduan	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah SPPT yang disalurkan ke wajib pajak	lembar	37.414	37.414	37.414	37.414	37.414	37.414	37.414	37.414	37.414	37.414	37.414	37.414	100	100	100	100	100
	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan yang terlaksana	keg	12 keg	10 keg	10 keg	100	100	100	100	100									
	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang	dokumen	32 dokumen	100	100	100	100	100											

	di susun									n	n	n	n	n					
	Jumlah pembinaan administrasi tat pemerintah desa yang terlaksana		Kegiatan	32 kegiatan	100	100	100	100	100										
	Jumlah Desa tertib administrasi Keuangan dan pendayagunaan aset desa yang terlaksana		Desa	16 desa	100	100	100	100	100										
	Jumlah desa tertib administrasi pembangunan yang terlaksana		Desa	16 desa	100	100	100	100	100										
	Jumlah desa tertib ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana		Desa	16 desa	100	100	100	100	100										
	jumlah desa tertib penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana		Desa	16 desa	100	100	100	100	100										
	Jumlah Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya yang terlaksana		Kegiatan	32 kegiatan	100	100	100	100	100										

**Tabel T.C.24.**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara**  
**Tahun 2017-2022**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Total	Kegiatan kecamatan pagentan	498.147.000	808.165.500	426.716.961	1.755.502.243		402.439.034	779.554.417	401.146.518	1.617.518.378		87	96,46	94.01	92.14		(24,49)	(24,63)

Dari data-data capaian sebagaimana yang terdapat dalam tabel T-C.23. dan T-C.24. diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program yang tidak terlaksana secara konsisten setiap tahunnya karena tidak adanya pengalokasian anggaran.

Misalnya :

1. Pada tahun 2019 terdapat anggaran yang cukup besar dikarenakan pada tahun tersebut dilaksanakan pemilihan kepala desa sejumlah 12 desa
2. Pada tahun 2021 juga tercatat anggaran yang besar, hal ini dikarenakan anggaran belanja tidak langsung (gaji ) masuk dalam pelaporan

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pagentan**

### **2.4.1 Tantangan**

Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan *Kecamatan Pagentan* pada empat tahun mendatang :

- a. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- c. Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

### **2.4.2 Peluang**

Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi pengembangan pelayanan *Kecamatan Pagentan* pada empat tahun mendatang :

- a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan

Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PAGENTAN**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan *Kecamatan Pagentan***

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pagentan menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

- a. Sekretariat
  - 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
  - 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
  - 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
  - 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
  - 5) Masih Lemahnya jaringan internet
  - 6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan
- b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
  - 2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
  - 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
  - 4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
  - 5) Kurangnya tertib administrasi desa
  - 6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
  - 7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
  - 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
  - 3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
  - 4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
  - 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
  - 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
  - 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Meningkatnya angka perceraian
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

### **3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berasal dari identifikasi permasalahan pada urusan yang ditangani *Kecamatan Pagentan*, mempertimbangkan renstra dari kementerian terkait dan *OPD pada Provinsi* dengan didasarkan tugas dan fungsi Baperlitbang merupakan kondisi atau hal yang asasi dan harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis di *Kecamatan Pagentan* ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bidang di *Kecamatan Pagentan*. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
2. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.

4. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
6. Masih kurangnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
7. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
8. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
9. Masih rendahnya kesadaran aparat pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).
10. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pagentan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010).

Tujuan pada merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh *Kecamatan Pagentan* Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

**Tujuan 1: Meningkatkan kualitas layanan publik**

Sasaran:

Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

**Tujuan 2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah**

Sasaran:

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah *Kecamatan Pagentan* beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pagentan**  
**Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Meningkatnya kualitas layanan publik</b>	<b>Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Angka</b>		<b>83,20</b>	<b>84,30</b>	<b>84,50</b>	<b>84,75</b>	<b>85</b>
				<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana</i>	%	100	100	100	100	100	100
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	laporan	12	12	12	12	12	12

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan usaha yang dilaksanakan	doku men	2000 pemo hon	200	150	150	150	150
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	Lapor an	1	1	1	1	1	1
				<i>Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum</i>	<i>Persentase Terselenggara nya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum</i>	%	0	100	100	100	100	100
				Koordinasi sinergitas dengan Kecamatan Pagentan dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaaa	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam	doku men	0	6	6	6	6	6

				n Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	%	100	100	100	100	100	100
				<i>Administrasi Umum Kecamatan Pagentan</i>	<i>Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah</i>	%	100	100	100	100	100	100
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	0	3	2	5	5	5
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	13	7	7	7	7	7
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	%	100	100	100	100	100	100

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12	12
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah</i>	%	100	100	100	100	100	100
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	8	8	9	9	9

				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	unit	0	4	2	3	4	4
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	unit	3	10	10	12	12	12
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	%	0	100	100	100	100	100
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	unit	0	8	50	4	4	4
				Pengadaan Gedung	Jumlah Pengadaan	unit	0	0	0	1	0	1

				Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor atau Bangunan Lainnya							
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	unit	0	3	4	4	4	4
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota</b>							
				<i>Administrasi Keuangan Persngkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan Persngkat Daerah</i>	%	100	100	100	100	100	100
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	11	12	12	13	15	17
				<i>Administrasi Keuangan Kecamatan Pagentan</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan Pagentan</i>	%	100	100	100	100	100	100
				Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	dokumen	7 orang	12	12	12	12	12

				SKPD								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	0	12	14	14	14	14
				<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Pagentan</i>	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Pagentan yang disusun</i>	%	0	100	100	100	100	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Pagentan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	0	8	8	8	8	8
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan	laporan	0	5	5	5	5	5

				Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD							
2	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>			<b>nilai</b>		<b>CC (56)</b>	<b>CC (56)</b>	<b>B (65,2)</b>	<b>B (65,2)</b>	<b>B (65,2)</b>
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan</b>	<b>Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Prosentase Pemberdayaan desa</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
				Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	16 desa	2	0	2	2	2

				<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan</i>	%	0	100	100	100	100	100
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga kemasyarakatan	0	1	1	1	1	1
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana</i>	%	100	100	100	100	100	100
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	dokumen	0	32	32	32	32	32

				Kepala Desa								
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	0	9	16	16	16	16
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	0		3	13		16
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	1	1	1	1	1	1
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	0	9	9	9	9	9

				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	0	9	10	10	10	10
				Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	dokumen	0	0	0	1	1	1
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah</i>	<i>Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah</i>	%	100	100	100	100	100	100
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	6 rumusan	1	4	4	4	4



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Pagentan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN
4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa

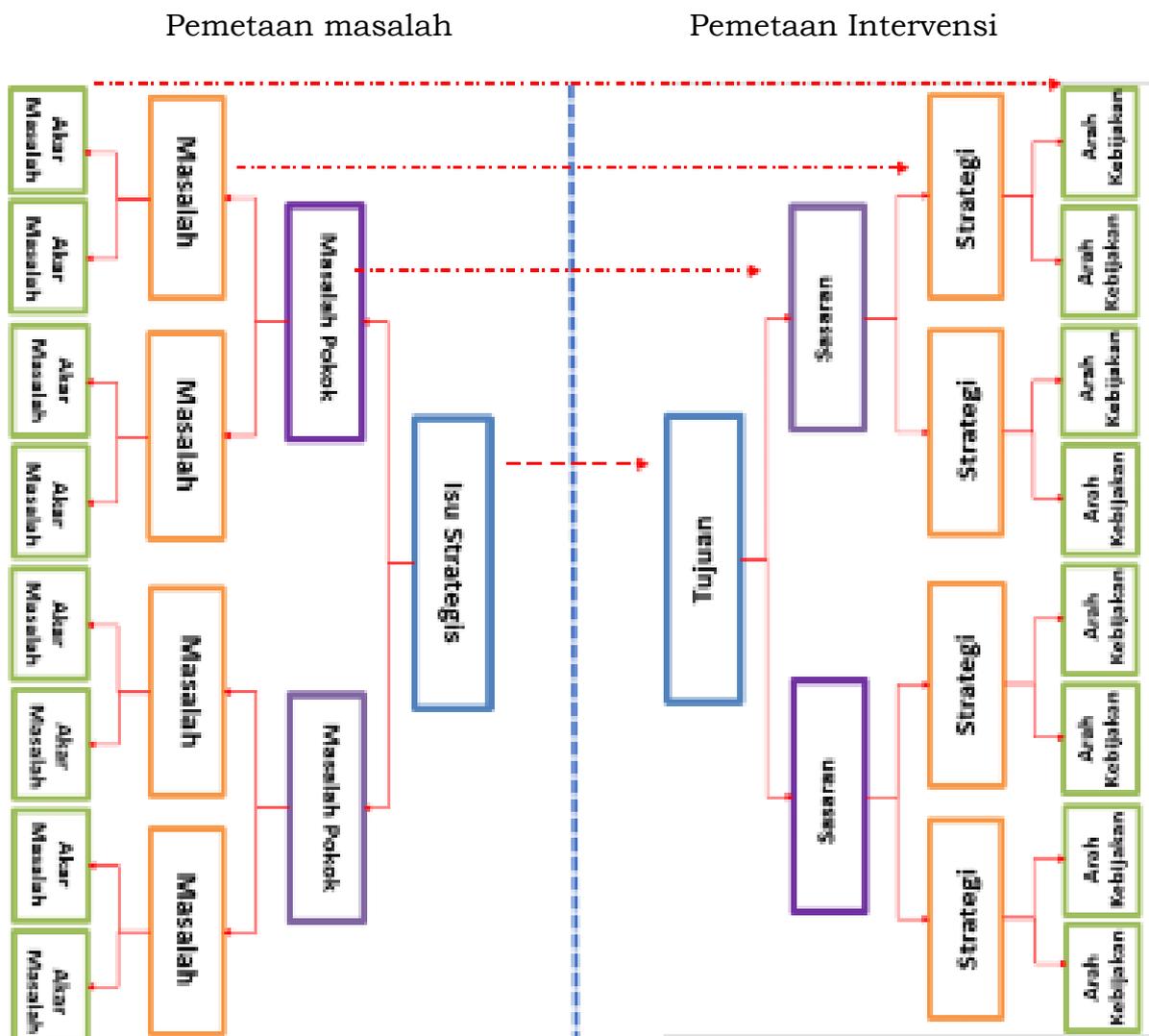
#### **5.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari *Kecamatan Pagentan* disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Pagentan**  
**Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	<p>-Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>-Peningkatkan kapasitas tim intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa;</p> <p>Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau</p> <p>-Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan;</p>	<p>Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>-meningkatkan kapasitas tim intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa;</p> <p>Mengembangkan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau</p> <p>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK;</p>

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	<p>Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa;</p> <p>-Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;</p>	<p>-Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan;</p> <p>-Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **5.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026**

Disebutkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 – 2026.

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 ( enam ) kegiatan yaitu

- a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Pagentan** yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Pagentan dan Koordinasi
  - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Kecamatan Pagentan** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
  - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,
- c. **Kegiatan Administrasi Umum Kecamatan Pagentan** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- d. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** mempunyai 3 ( tiga ) sub kegiatan yaitu
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan gedung lainnya.
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari 2 ( dua ) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
  - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. **Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah** terdiri dari 3 ( tiga ) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu**

- a. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- b. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** yang terdiri dari 3 ( tiga ) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
  - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
  - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. **Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahanan Desa** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
  - Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - Sub kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  - Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.
5. **Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**, , dengan 2 (dua) kegiatan yakni : Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Yang Terdiri Dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Wilayah Kecamatan. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terdiri satu sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

## **5.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pagentan**

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif *Kecamatan Pagentan* tercantum pada Tabel

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan**  
**Pagentan Kabupaten Banjarnegara**  
**Tahun 2023-2026**

*Dalam ribuan rupiah*

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023	Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
0-00.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana</b>	100	100% 1.621.415.829	100% 1.818.526.985	100% 1.920.655.000	100% 1.990.888.000	100% 2.102.000.505	100% 2.110.312.555	Kecamatan					
0-00.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi</b>	100	0 0	100% 9.000.000	100% 9.500.000	100% 10.250.000	100% 11.000.000	100% 11.640.000	Kecamatan					

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	n Pagentan	Kinerja Perangkat Daerah yang disusun														
0-00.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Pagentan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000	0	0	8 dokumen	2.500.000	8 dokumen	5.000	8 dokumen	6.000	8 dokumen	6.000	8 dokumen	21.000	Kecamatan
0-00.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	2,025.000	0	0	5 laporan	6.500.000	5 laporan	6.800	5 laporan	7.500	5 laporan	8.000	5 laporan	20.500	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	SKPD															
0-00.01.2.02	Administrasi Keuangan Kecamatan Pagentan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	1.443.914.034	100 %	1.541.420.822	100 %		100 %		100 %		100 %		Kecamatan
0-00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang	11 orang	1.405.634.034	12 orang/12 bln	1.494.530.822	12 orang/12 bln	2.000.000	13 orang/12 bln	2.250.000	15 orang/12 bln	2.500.000	17 orang/12 bln	18.495.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.20	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	6 orang	7 orang	38.280.000	12 dokumen	40.000	12 dokumen	50.000	12 dokumen	55.000	12 dokumen	60.000	12 dokumen	42.500	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	0	0	12 dokumen	6.900.000	14 dokumen	7.000.000	14 dokumen	7.600.000	14 dokumen	7.700.000	14 dokumen	22.000	Kecamatan
	<b>Administrasi Umum Kecamatan Pagentan</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100	100	52.574.100	100 %	82.127.300	100 %		100 %		100 %		100 %		Kecamatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	3 paket	8.127.300	2 paket	15.000	5 paket	15.000	5 paket	20.000	5 paket	65.000	Kecamatan
	Penyediaan	Jumlah Paket	1	13	52.574.	7	74.000..0	7	85.000	7	90.000	7	95.000	7	350.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100	paket	00	paket		paket		paket		paket			
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	0	0	0	100 %	42.500.000	100 %		100 %		100 %		100 %		Kecamatan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	3 unit	7.500.000	4 unit	30.000	4 unit	30.000	4 unit	30.000	15 unit	30.000	Kecamatan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	0	0	3 unit laptop dan 4	35.000	50 unit (45 unit kur	45.000	4 unit	50.000	4 unit	40.000	66 unit	47.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Disediakan			unit apa r 1 unit CCTV			si dan 5 unit)								
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya		0		0		0		1	5.000.000.000	0		1	5.000.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	100	105.297.295	100%	165.000.000	100%	192.000.000	100%	220.000.000	100%	248.000.000	100%	275.000.000	Kecamatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12	7.200.000	12 laporan	15.000	12 laporan	17.000	12 laporan	20.000	12 laporan	23.000	12 laporan	25.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dan Listrik	Disediakan														
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	98.097.295	12 laporan	150.000.000	12 laporan	175.000	12 laporan	200.000	12 laporan	225.000	12 laporan	250.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100	100		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kecamatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	8 unit	7.435.200	8 unit	23.500.000	8 unit	22.500	9 unit	25.000	9 unit	27.500	9 unit	35.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0	4 unit	63.000.000	2 unit	70.500.000	3 unit	80.000.000	4 unit	85.000.000	4 unit	90.000.000	Kecamatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		3	12.195.200	10 unit	10.000.000	10 unit	17.500	12 unit	20.000	12 unit	22.000	12 unit	24.500	Kecamatan
	PROGRAM PENYELENG	<b>Presentase penyelenggaraan</b>	100	100	100		100%			100%		100%		100%		Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	GARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	pemerintahan dan pelayanan Publik				%											
	A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	0		100%		100%		100%		100%		100%			Kecamatan
	1.Koordinasi/Sinergi dengan Kecamatan Pagentanan dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Kecamatan Pagentanan dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	0	0	6	5.000.000	6	6.000.000	6	6.500.000	6	7.000.000	6	7.500.000		Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum															
	B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	100	100	60.276.000	100 %	74.000.000	100 %	76.000	100 %	77.000	100 %	85.000	100%	95.000	Kecamatan
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2000	2000	5.666.000	200 dokumen	7.500.000	150 dokumen	10.500	150 dokumen	1.2000	150 dokumen	12.000	150 dok	12.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Perizinan Non Usaha															
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	100	0	0	12 laporan	10.500.000	12 laporan	11.000.000	12 laporan	7.500	12 laporan	12.000.000	48 laporan	12.500.000	Kecamatan
	3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan)	1	1	60.276.000	1 laporan	65.000.000	1 laporan	65.000	1 laporan	65.000	1 laporan	70.000	4 laporan	75.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Lain yang Dilimpahkan															
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0	0	0	0		100		100		100		100		Kecamatan
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat dan desa	0	0	0	100 %	20.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.500.000	100 %	7.500.000	100%	7.500.000	Kecamatan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayan	jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan an	0	0	0	2 dok	20.000.000	0 dok	0	2 dok	6.500.000	2 dok	7.500.000	2 dok	7.500.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	aan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	masyarakat desa														
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	0	0	0	100 %	3.500.000	100 %	10.000.000	100 %	12.000.000	100 %	14.000.000	100%	15.000.000	Kecamatan
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	0	1 lembaga kemasyarakatan	3.500.000	1 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	1 lembaga kemasyarakatan	12.000.000	1 lembaga kemasyarakatan	14.000.000	1 lembaga kemasyarakatan	15.000.000	Kecamatan
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>- Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		100		Kecamatan
	<b>Penyeleng</b>	<b>Prosentase</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	garaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah		%		%		%		%		%					
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tugas Forkompinc yang dilaksanakan	100%	6	9.600.00	1 dokumen	15.000	4 dokumen	15.000	4 dokumen	18.000	4 dokumen	18.000	16 dokumen	66.000		Kecamatan
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100			Kecamatan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100			Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pemerintahan Desa	terlaksana														
<b>2.06.4.06.10.17</b>	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0	32 dokumen	4.000	32 dokumen	5.000	32 dokumen	6.000	32 dokumen	7.000	32 dokumen	22.000	Kecamatan
<b>2.06.4.06.10.17.52</b>	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	0	0	9 dokumen	6.000	16 dokumen	6.500	16 dokumen	7.000	16 dokumen	8.000	16 dokumen	10.000	Kecamatan
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0			3 dok	60.000.000	13 dok	260.000.000			16 dokumen	320.000.000	Kecamatan
	Fasilitasi Pengelolaan Desa dan Pendayaguna	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	100	0	0	9 dokumen	11.000	10 dokumen	11.000	10 dokumen	12.000	10 dokumen	13.000	10 dokumen	15.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	an Aset desa	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100	1 dok	9.284.000	1 dokumen	14.000	1 dokumen	14.000.000	1 dokumen	16.000.000	1 dokumen	18.000.000	1 dokumen	18.000.000	Kecamatan
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	0	0	9 dokumen	5.000.000	9 dokumen	5.500.000	9 dokumen	6.000.000	9 dokumen	6.500.000	9 dokumen	10.000.000	Kecamatan
	Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Dokumen fasilitasi koordinasi pendampingan	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	17.500	1 dokumen	20.000	1 dokumen	70.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		desa di wilayahnya															

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Kecamatan Pagentan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pagentan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra *Kecamatan Pagentan* tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja Kecamatan Pagentan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Pagentan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	Nilai IKM		83,20	84,30	84,50	84,75
2	Nilai Sakip OPD		CC (56)	CC (56)	B (65,2)	B (65,2)

## **BAB VIII PENUTUP**

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) *Kecamatan Pagentan* tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada *Kecamatan Pagentan* agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada *Kecamatan Pagentan* dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra *Kecamatan Pagentan* akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) *Kecamatan Pagentan* yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja *Kecamatan Pagentan* wajib berpedoman pada Renstra *Kecamatan Pagentan*.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra *Kecamatan Pagentan*, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra *Kecamatan Pagentan* sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) *Kecamatan Pagentan* tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian ”dapat tercapai.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal : Februari 2022

KEPALA PERANGKAT DAERAH,  
CAMAT PAGENTAN



**AGUS PRASETYO, S.SOS**  
NIP. 19640810 198903 1 010